

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2026 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan dengan tipologi A yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

b.1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2026 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan dengan tipologi A yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b.2 Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan, kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka pembangunan daerah.

b.3 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan Kebijakan Pengelolaan, Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang laut di luar Minyak dan

Gas Bumi, Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut dan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai 12 (Dua Belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan diatas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pembudidayaan ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- 2) Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan, Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang laut di luar Minyak dan Gas Bumi, Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut dan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai 12 (Dua Belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan diatas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pembudidayaan ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan diatas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pembudidayaan ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Pelaksanaan Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- 4) Pelaksanaan Adminitrasi Dinas Kelautan dan Perikanan.

a. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penetapan Pengelolaan Perairan Wilayah Laut Provinsi.
- b. Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi dan Pengelolaan Kekayaan Laut Sebatas Wilayah Laut Kewenangan Provinsi.
- c. Konservasi dan Pengelolaan Plasma Nutfah Spesifik Lokal serta Suaka Perikanan di Wilayah Laut.
- d. Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan dan Penangkapan pada Wilayah Laut Kewenangan Provinsi.
- e. Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Laut Kewenangan Provinsi.
- f. Pelatihan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- g. Alokasi Sumberdaya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan.

- h. Penelitian Bidang Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi.
- i. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.

C. Aspek Strategis Organisasi

Lingkungan Strategis yang meliputi Lingkungan intern sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Identifikasi dan analisa faktor – faktor lingkungan strategis mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Untuk menjalankan kebijakan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu di bantu 3 (Tiga) UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas), Yaitu :

1. UPTD Balai Pelabuhan Perikanan (BPP) Pulau Baai
2. UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPBPPMHP)
3. UPTD Balai Budidaya Ikan Laut dan Payau (BBILP)

D, Permasalahan Utama (Strategis issue) yang dihadapi Organisasi

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan antara lain yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah
2. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan(NTN) dan Pembudidaya Ikan (NTPi)
3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja

Identifikasi pemasalahan yang di hadapi dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budiaya . untuk meningkatkan Produksi perikanan tangkap yaitu terbatasnya Anggaran dalam Pembangunan Pelabuhan Nusantara (PPN) Tahun 2024 belum bisa di fungsikan karena masih dalam tahap Pembangunan dan akan di Fungsikan pada Tahun 2025 sehingga hasil Tangkapan Nelayan Belum Optimal, terbatasnya anggaran untuk batuan kapal nelayan, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia petugas, nelayan dan pelaku usaha bidang penangkapan.

Dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya teridentifikasi permasalahan yang ada saat ini antara lain jumlah dan kualitas induk unggul masih terbatas baik milik DKP maupun milik UPR, tingginya biaya produksi (pakan), usaha pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan kurang memadai, belum terbentuknya akses pasar hasil Perikanan, Pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing yang didukung dengan penguatan ketersediaan dan kontinuitas Produksi perikanan, serta pembangunan kawasan sentra industri perikanan terpadu serta Pengendalian preventif pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan masyarakat yang telah meleak peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Perikanan yang aktif, serta cakupan wilayah penyebaran informasi tentang peraturan perundang-undangan bidang perikanan

Dalam mendukung tujuan meningkatnya tata kelola kinerja masih terdapat permasalahan yang ada terbatasnya sumberdaya manusia yang ada, terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung optimalisasi tugas pokok dan fungsi serta rendahnya disiplin pegawai dalam mendukung Good Governance

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dan pelaksanaan kebijakan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran, tidak terlepas dari anggaran yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Rincian biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 baik bersumber dana APBN **Rp. 1.713.932.000,-** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang sudah terealisasi 97,011% dan APBD-P adalah sejumlah **Rp. 30.138.411.752,-** (*Tiga Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) terealisasi **Rp. 29.685.803.740,-** (*Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau 98,49 %, terdapatnya sisa dana kegiatan sebesar **Rp. 630.940.012,-** (*Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Belas Rupiah*) diantaranya : kegiatan di Program Penolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi dan program Pengelolaan Perikanan Budidaya disebabkan Keterbatasan Waktu Pelaksanaan, serta sisa belanja langsung yang tidak habis pakai karena alasan konvensional Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

D. Struktur Organisasi , Sumberdaya Manusia

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Perikanan Tangkap
4. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Bidang Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan
6. Bidang Pengelolaan Ruang Laut
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, dan Bidang diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, membawahi:

- Sekretaris

- Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- Kepala Bidang Perikanan Budiaya
- Kepala Bidang Pengawasan
- Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL)

2. Sekretaris

Tugas Pokok :

Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi

Fungsi:

- Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas sekretariat
- Penyusunan rencana kerja program kerja dan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan
- Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan kelengkapan dan urusan kepegawaian dilingkungan Dinas Kelautan dan perikanan
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas kelautan dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Dinas Kelautan dan perikanan
- Pelayanan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan
- Pengkoordinasian proses pengidentifikasi permasalahan pada bidang-bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitas dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
- Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Sekretariat membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, bertugas: mengelola administrasi kepegawaian, administrasi Persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, Dokumentasi, informasi, menghimpun Peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang Kelautan dan perikanan serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, bertugas: mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Kepala Sub Bidang Keuangan, bertugas: mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan menyangkut menyelenggarakan penyiapan Koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil, menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapasitas pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT dan menerbitkan buku kapal perikanan

Fungsi:

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap
- Penyiapan bahan – bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap
- Pengumpulan data penyiapan Koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil, menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi, menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT dan menerbitkan buku kapal perikanan
- Pengidentifikasian dan analisis penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil, menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) gross tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) gross tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;

- Pengevaluasian pelaksanaan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;
- Menghadiri rapat teknis pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi, menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT dan menerbitkan buku kapal perikanan sesuai disposisi atasan.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi:

- a. Kepala Seksi Sumber Daya Ikan dan Alat penangkapan Ikan , bertugas melakukan pengumpulan data, Identifikasi, Analisis, Penyiapan bahan perumusan, melaksanakan kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Usaha perikanan Tangkap dan Kenelayan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data , identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, melaporkan pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Usaha perikanan (SIUP), Surat Izin penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, Izin pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan menerbitkan buku kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pelabuhan Perikanan , melakukan pengumpulan data , identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Izin lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan perikanan provinsi

4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tugas Pokok:

LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Melaksanakan pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan kapal pengangkut Ikan hidup hasil pembudidayaan serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan

Fungsi:

- Penyusunan rencana tugas pelaksanaan Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Penyiapan bahan – bahan dan Data yang berkenaan dengan Bidang perikanan Budidaya, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Pelaksanaan Fasilitas perumusan kebijakan di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- Pengevaluasian pelaksanaan di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan iakan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- Penyusunan lapaoran pelaksanaan di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- Menghadiri rapat teknis di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan iakn, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitanizin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai disposisi;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

Kepala Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:

- a. Kepala Seksi Pengembangan Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta jaminan mutu budidaya perikanan mempunyai **tugas**, merumuskan kebijakan teknis, penyusunan program, pembinaan dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta memonitor dampaknya.
- b. Kepala Seksi pelayanan usaha perikanan budidaya mempunyai **tugas** melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijaka, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya ikan ukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); menerbitkan IUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. Kepala seksi pelayanan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai **tugas** melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL)

Tugas Pokok:

Melaksanakan pelayanan teknis, identifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, evaluasi dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan DKP Provinsi Bengkulu.

Kepala bidang pengelolaan ruang laut mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan, penerbitan izin, pemanfaatan ruang dan laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan menyusun laporan pengelolaan ruang laut.

Fungsi:

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang pengelolaan ruang laut
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan ruang laut
- Pelaksanaan fasilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan, penerbitan izin dan manfaat ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan penerbitan izin dan manfaat ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengevaluasian laporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin dan manfaat ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Menghadiri rapat teknis pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan ruang laut
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan ruang laut; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut membawahi :

- a. Kepala seksi tata ruang laut, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai **tugas** melaksanakan penetapan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K); dan pemberdayagunaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. Kepala seksi jasa kelautan mempunyai **tugas** melaksanakan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT)
- c. Kepala seksi konservasi dan keanekaragaman hayati laut mempunyai **tugas** melaksanakan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zona kawasan

konservasi; melaksanakan penataan batas kawasan konservasi; dan mengelola kawasan konservasi

6. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan Koordinasi, fasilitasi perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil.

Fungsi:

- Penyusunan rencana tugas pelaksanaan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil
- Pelaksanaan pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (Dua Belas) mil
- Pengevaluasian pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil
- Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil
- Menghadiri rapat teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil sesuai dengan disposisi atasan
- Pengevaluasi tugas pelaksanaan bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Penyusunan laporan tugas pelaksanaan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:

- a. Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau –pulau Kecil (P3K), bertugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan.
- b. Kepala Seksi Pengawasan Pembudidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), bertugas melakukan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan

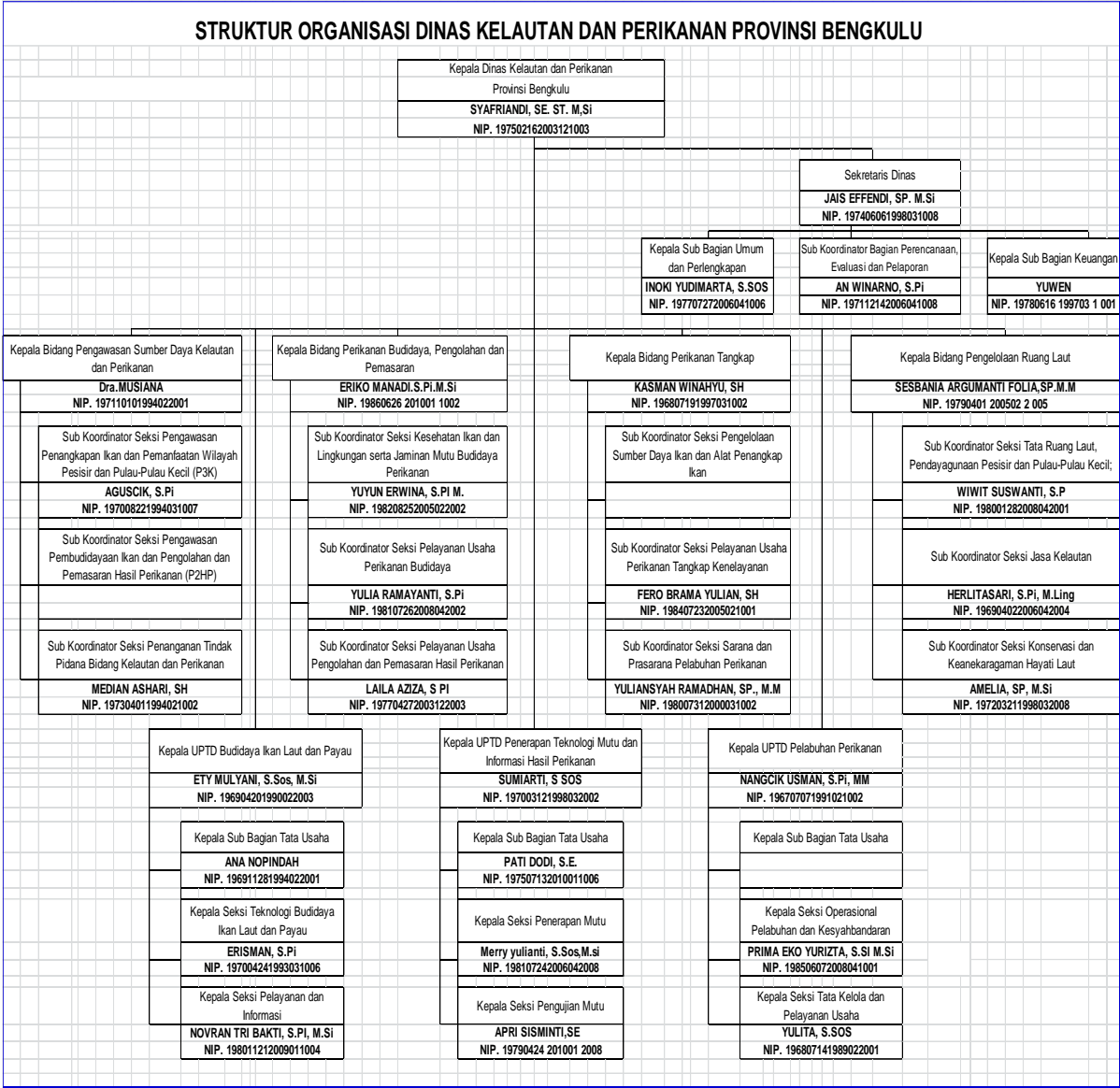
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

- c. Kepala Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan, bertugas melakukan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan..

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah:

- a. Balai Pelabuhan Perikanan (BPP) Pulau Baai
- b. Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP)
- c. Balai Budidaya Ikan Laut/Pantai (BBILP)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Sumber Daya SKPD diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan. Gambaran umum keadaan Sumberdaya SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu saat ini dapat dilihat dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki.

Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia yang tersedia sebanyak 154 orang, yang terdiri dari 94 orang PNS dan 60. orang tenaga honorer.

- a. Strata 2 : 24 Orang
- b. Strata I/DIV : 44 Orang
- c. Diploma 3 : 4 Orang
- d. Sekolah Lanjutan Atas : 22 Orang
- e. sekolah Menengah Pertama : Orang
- F. sekolah Dasar : Orang

Tabel 1. Keadaan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Menurut Jabatan dan Pendidikan Tahun 2023.
Sumber : Subbag Umum dan Perlengkapan DKP Provinsi Bengkulu, 2023.

NO	Kualifikasi Pendidikan	Jml	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV					Jabatan Esselon Pejabat Struktural						Pejabat fungsional	
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	II		III		IV			
																				a	b	a	b	a	b		
1	SD	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	SLTP	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Orang Fungsional PPNS	
3	SLTA	21	-	-	-	-	-	1	3	5	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	D.1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	D.2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	D.3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	S.1/D.4	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	26	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	S.2	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	S.3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH		94	0	0	0	0	0	1	3	5	10	17	7	22	13	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Penyelenggaraan roda pemerintahan pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta melakukan penegakan supremasi hukum. Kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan birokrasii pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan nilai-nilai ideal akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta mampu berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara dalam konsep nawa cita yang menjadi arah kebijakan pembangunan nasional.

Dasar Hukum

Laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan, sehingga dalam penyusunan laporan ini mengacu kepada :

- 1) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
- 4) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
- 5) Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Gubernur Bengkulu Tahun 2025 Nomor 800/0610/I/2025.
- 6) Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor 800/1743/I/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pedoman yang komprehensif, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu disusun mengikuti format

dari Sekretariat Daerah berdasarkan lampiran surat nomor: 060 / 3525/B.5/2021 yang terdiri dari 4 BAB, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Organisasi
- E. Stuktur Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Visi
- C. Misi
- D. Tujuan
- E. Sasaran
- F. Indikator Kinerja
- G. Strategi
- H. Kebijakan
- I. Program
- J. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

2.2 Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu serta melihat latar belakang dan mencermati isu yang berkembang, maka visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN, MAJU DAN BERDAYA
SAING UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

Pernyataan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu mengacu pada pernyataan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Bengkulu. Selayaknya memang visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu mendukung sepenuhnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal ini mengacu bahwa keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai beban dan tanggungjawab dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kekuatan sumberdaya manusia kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu pada khususnya.

Harapan tersebut akan terwujud melalui pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya menuju hilirisasi. Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan orientasi inovasi dan hilirisasi dari perikanan budidaya dan tangkap dipandang tepat karena sampai dengan saat ini produksi perikanan di Provinsi Bengkulu masih didominasi dari produksi perikanan rakyat dengan skala semi tradisional dan mikro. Sementara itu usaha perikanan yang dikelola swasta belum berkembang.

2.3 Misi

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dalam rangka untuk mewujudkan visi di atas adalah:

- 1) Meningkatkan produk hasil kelautan dan perikanan yang aman, bernilai tambah dan berdaya saing.
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
- 4) Meningkatkan iptek sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

2.4 Tujuan

Tujuan Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. **Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan** yang akan dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD.
- 2) Meningkatkan Pertumbuhan Sub sektor Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (NTN) dan Pembudidaya Ikan (NTPi).

2.5 Sasaran

Sasaran strategis merupakan perwujudan dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dialokasikan dalam 5 (lima) periode atau tahun dengan rangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja (Renja).

Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Masing-masing sasaran ditetapkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Secara keseluruhan sasaran, kebijakan dan program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang dituangkan dalam renstra kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis:

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD.
- 2) Meningkatnya Produksi Perikanan.

2.6 indikator Kinerja

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur yang merupakan indikator Kinerja yang terkait langsung dengan Perjajian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yaitu indikator dengan sasaran “ **Meningkatnya Produksi Perikanan** “ dengan Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap(Ton), Produksi Perikanan Budidaya (Ton), Jumlah Pengelolaan dan pemasaran Hasil Perikanan. inilah yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk bisa mencapai target yang ditentukan, semua dilaksanakn dalam rangka mendukung pencapaian IKD.

2.7 Strategi

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produksi dan kualitas benih/bibit serta populasi dan produksi perikanan budidaya.
- 2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pakan ikan/perikanan budidaya.
- 3) Peningkatan luas lahan perikanan budidaya dan optimalisasi jumlah pembudidaya yang ditingkatkan keahliannya dalam membuat pakan.
- 4) Peningkatan jumlah dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan.
- 5) Peningkatan jumlah kapal penangkap ikan dengan ukuran GT yang lebih besar untuk menunjang produksi perikanan tangkap.
- 6) Peningkatan jumlah alat tangkap dan mesin kapal untuk mendukung besarnya volume produksi perikanan tangkap.
- 7) Peningkatan jumlah dan kualitas pengolahan hasil perikanan.
- 8) Peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan yang berorientasi agribisnis.
- 9) Peningkatan pengendalian pelaku usaha perikanan yang taat aturan untuk mendukung sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- 10) Peningkatan kelompok masyarakat pengawas yang dibina untuk mendukung sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- 11) Peningkatan luas vegetasi pantai yang di konservasi untuk optimalisasi kelestarian ekosistem laut.
- 12) Peningkatan biota laut yang telah dilakukan upaya pelestarian dalam mendukung kelestarian ekosistem laut.
- 13) Peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya.

2.8. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Beberapa kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk mencapai tujuan dalam periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan regulasi Kelautan dan Perikanan.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit sesuai dengan standar.
- 3) Peningkatan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengolahan dan pengawasan potensi sumberdaya kelautan.
- 4) Peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, pemasaran hasil perikanan.
- 5) Peningkatan pengelolaan dan pengawasan potensi sumberdaya kemaritiman.
- 6) Peningkatan regulasi Kelautan dan Perikanan.
- 7) Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan kelompok usaha bersama perikanan tangkap melalui badan hukum.
- 8) Pencegahan penangkapan *baby fish* untuk pelestarian biota laut.
- 9) Pelarangan penggunaan alat tangkap trawl untuk pelestarian biota laut.
- 10) Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis.
- 11) Penerapan teknologi budidaya pakan ikan.
- 12) Pembinaan dan pengawasan serta pemanfaatan pakan lokal dan limbah perikanan.
- 13) Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ikan lokal.
- 14) Pengembangan perencanaan partisipatif dan *Bottom Up Planning*.
- 15) Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perikanan.
- 16) Penerapan sistem jaminan mutu produk hasil olahan perikanan.
- 17) Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
- 18) Mendorong tumbuhnya industri hilir melalui SKP (Standar Kelayakan Pengolahan).
- 19) Peningkatan peluang investasi dibidang perikanan.
- 20) Peningkatan akses sumber-sumber permodalan/pembiayaan.
- 21) Peningkatan keamanan dan kenyamanan usaha di bidang perikanan.
- 22) Penerapan usaha perikanan yang ramah lingkungan.

2.9 Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan :

a. APBN

Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal / 01)

- 1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN.

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Ditjen Perikanan Budidaya / 04)

- 1) Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan.
- 2) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Ditjen Perikanan Tangkap / 03)

- 1) Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan.
- 2) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
- 3) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan.
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- 5) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Program Peningkatan Daya Saing dan Usaha Produk Perikanan (Ditjen PDSPKP / 06)

- 1) Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- 2) Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan.
- 3) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP.

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Ditjen Pengawasan SDKP / 05)

- 1) Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan.
- 2) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

Program Kualitas Lingkungan Hidup (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut / 07)

- 1) Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
- 2) Perencanaan Ruang Laut.
- 3) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

b. APBD

Program Rutin:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Pembangunan:

- 1) Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- 4) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2.10 Perjanjian Kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu telah menyusun penetapan Kinerja dalam satu dokumen tersendiri yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada **tanggal 29 Januari 2024 Nomor: 800/0672/II/2025.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor :

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAFRIANDI, S.E., S.T., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DR. H. ROHIDIN MERSYAH**
Jabatan : Gubernur Bengkulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR BENGKULU

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

Dr. H. ROHIDIN MERSYAH

SYAFRIANDI, S.E., S.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750216 200312 1 003

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

OPD: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PENGITUNGAN	CAPAIAN EXISTING 2024	TARGET KINERJA 2025
1	Tujuan 1 Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	Data BPS (data pdrb pertanian,kehut m dan Perikanan)	29,91 %	3,60%
	Sasaran 1.1 Meningkatnya produksi perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	Hasil Validasi KKP Semester I	40.201,807 TON	90.117,67 TON
		Produksi Perikanan Budidaya	Hasil Validasi KKP sementara sem II	144.482,085 TON	233.108 TON
2	Tujuan 2 Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan (NTN) dan Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Nelayan	Hasil Evaluasi BPS	108,89	112
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Hasil Evaluasi BPS	105,64	135,56
	Sasaran 2.1 Meningkatnya produksi perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	Hasil Validasi KKP Semester I	40.201,807 TON	90.117,67 TON
		Produksi Perikanan Budidaya	Hasil Validasi KKP sementara sem II	144.482,085 TON	233.108 TON
3	Tujuan 3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB
	Sasaran 3.1 Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.107.673.200,-	APBD
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 470.000.000,-	APBD
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 8.600.000.000,-	APBD
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 3.404.608.000,-	APBD
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp. 1.015.000.000,-	APBD
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 540.000.000,-	APBD
7. Sekretariat Jenderal	Rp. 310.460.000,-	APBN
8. Ditjen Perikanan Tangkap	Rp. 167.700.000,-	APBN (TP)
9. Ditjen Perikanan Tangkap	Rp. 405.324.000,-	APBN
10. Ditjen Perikanan Budidaya	Rp. 417.470.000,-	APBN
11. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 171.652.000,-	APBN
12. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Rp. 340.696.000,-	APBN
13. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Rp. 485.600.000,-	APBN

Bengkulu, Januari 2025

GUBERNUR BENGKULU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

Dr. H. ROHIDIN MERSYAH

SYAFRIANDI, S.E., S.T., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750216 200312 1 003

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan Gubernur

Nomor :

Tanggal :

PERJANJIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR TAHUN 2025
OPD: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SUMBER PENDANAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemberian izin usaha perikanan serta pemberian alat tangkap gratis	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang TersediaWilayah Laut sampai dengan 12 Mil	10 Kelompok	APBD
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	25 Rekomendasi	APBD

Bengkulu, Januari 2025

GUBERNUR BENGKULU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

Dr. H. ROHIDIN MERSYAH

SYAFRIANDI, S.E., S.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750216 200312 1 003

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Kepala

Nomor :

Tanggal :

PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN PRIORITAS OPD TAHUN 2024

OPD: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUMBER PENDANAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun pelabuhan perikanan dan pemberian izin usaha perikanan serta pemberian alat tangkap gratis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Pelabuhan Perikanan	APBD

Bengkulu, Januari 2024

GUBERNUR BENGKULU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

Dr. H. ROHIDIN MERSYAH

SYAFRIANDI, S.E., S.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750216 200312 1 003

Nomor :
Tanggal :

PERJANJIAN KINERJA KHUSUS TAHUN 2024
OPD: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

NO	URAIAN	TARGET
1	Nilai Indeks RB OPD	B
2	Nilai Evaluasi AKIP OPD	BB
3	Persentase tindak lanjut LHP OPD	75%
4	Nilai LPPD OPD	100 %
5	Kategori Inovasi OPD	inovatif
6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD	Menuju Informatif
7	Persentase Pencapaian MCP Renaksi KPK	80%
8	Capaian Realisasi Anggaran (TEPRA)	95%
9	Indeks Profesionalisme ASN	63

Bengkulu, Januari 2024

GUBERNUR BENGKULU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

Dr. H. ROHIDIN MERSYAH

SYAFRIANDI, S.E., S.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750216 200312 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Cendana No 61, Kel Sawah Lebar, Kec. Ratu Samban, Bengkulu 38222
Telp (0736) 21477 Website : <https://dkp.bengkuluprov.go.id/>
Email : provinsibengkuludkp@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SYAFRIANDI, S.E., S.T., M.Si**
NIP : 19750216 200312 1 003
Pangkat/Golongan : IV.c / Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Kontrak Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Bengkulu tanggal Januari 2024, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Akan medistribusi Perjanjian Kinerja kepada seluruh jajaran mulai dari eselon III, IV dan staf/fungsional;
2. Menyusun Rencana Aksi tahapan realisasi kinerja ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala ;
4. Melaporkan capaian kinerja secara berkala triwulanan dan tahunan ;
5. Mencapai realisasi kinerja sesuai yang ditargetkan ;
6. **Apabila tidak melaksanakan sebagaimana butir 1 s.d. 5 dan tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka saya siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya yang merupakan bagian komitmen melaksanakan Kontrak Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2024

GUBERNUR BENGKULU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

Dr. H. ROHIDIN MERSEYAH

SYAFRIANDI, S.E., S.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750216 200312 1 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

a. Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2024

Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sub sektor Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dicapai melalui :

Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Perikanan

Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja persentase Subsektor Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan target 3.40 % dalam rilis BPS sampai triwulan III klau di Lihat dari hasil rilis bps nilai PDRB Tahun 2024 sebesar 29,91 % itu mencakup nilai PDRB di tinjau dari nilai PDRB menurut lapangan usaha (Persen) sedangkan untuk data PDRB Perikanan masih mengacuh pada angka tahunan tahun 2023 sebesar 5.3 % dalam upaya mencapai target kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB di uraikan dalam bentuk sasaran 1.1 yaitu meningkatnya Produksi Perikanan. Untuk target Produksi Perikanan dapat di uraikan pada sasaran ke 2. Faktor pendukung tercapainya target yang telah di tetapkan yaitu ada kenaikan harga ikan Eksport data laulintas eksport ikan di BKIPM,data dari PPI mengalami kenaikan dan adanya fenomena ada musim ikan yang membuat kenaikan capaian pada PDRB tahun 2023

Tujuan 2: Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan (NTN) dan Pembudidaya Ikan (NTPi)

Dicapai Melalui:

Sasaran

Sasaran 2 Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran **Meningkatnya Produksi Perikanan** merupakan salah satu **indikator** utama dalam penilaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini. Indikator kinerja yang akan disampaikan semuanya mempunyai peran dalam pencapaian kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan. Capaian Kinerja Utama **Meningkatnya Produksi Perikanan** dengan 4 indikator.

Tabel 2. Indikator Kinerja Sasaran 3. Meningkatnya Produksi Perikanan

Uraian		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi			% Capaian
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	232.957	212.025,67	160.170.674	144.482.085 (data smt 11 sementara)	62,02
2.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		135,56	76,26	101,50	105,64	77,92
3.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	90.117.67	87.492,89	82.976.90	40.201.807 (data smt 1)	44,61
4.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		112	106,35	104,12	108,89	97,22
		Persentase capaian sasaran ini adalah					70,44

Sasaran Kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan yang telah ditetapkan tahun 2024 belum bias di persentasekan dikarenakan data Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya persen capaiannya belum bisa dikalkulasi karena data yang diperoleh masih data semester I yang sudah divalidasi (One data Pusdatin KKP RI, 2024). sedangkan untuk capaian sementara masih menggunakan Data Produksi Tahun 2024 hal ini Adapun indikator kinerja terukur dari:
Kinerja Sasaran

1. Produksi Perikanan Budidaya

Persentase capaian produksi perikanan budidaya di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 Data sementara Produksi perikanan Budidaya sebesar 144.482,085 namun data tersebut belum di validasi oleh nasional untuk semester II, namun data tersebut bisa kita jadikan pengukuran tercapainya target kinerja hanya menunggu data rilis dari KKP saja. Data yang sudah di validasi nasional data semester I Tahun 2024 sebesar 72.897 Ton dengan target produksi Budidaya sebesar 232.957 Ton dengan demikian pencapaian target tahun 2024 bisa di ukur menggunakan data sementara semester II yaitu dengan target 232.957 realisasi capain target sebesar 144.482,085, pencapaian persentase target adalah 62,02 Persen hal ini dapat di peroleh hasil produksi sementara tahun 2024 menurun di bandingkan tahun 2023 yang pencapain target sebesar 160.170,674 dari target 231.164 dengan pencapaian pesetase Produksi sebesar 69,28 %. Hal ini di karenakan adanya perbaikan Irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam pencapaian target produksi Perikanan Budidaya untuk tahun 2024 ini masih relevan dengan adanya beberapa kegiatan penunjang di bidang Perikanan Budidaya namun hasil produksi ini tidak terlau mempengaruhi besaran target yang di tentukan.

Kegiatan–kegiatan yang mendukung Program pengelolaan perikanan budidaya Tahun 2024 yang bersumber dari APBD dan APBN untuk Tahun 2024 Bidang perikanan Budidaya mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) diantaranya adalah Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah

Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota kegiatan tersebut terpusat di Kabupaten Bengkulu utara dan kabupten Kepahyang antara lain Rehabilitasi Kolam atau bak pemijahan di BBI Sentral dan BBI Klobak, saluran Pasok/buang di BBI sentral dan BBI Klobak, Penyediaan sarana peralatan Produksi di BBI Sentral dan Penyediaan Calon Induk dan Pakan di BBI Sentral dan BBI Klobak. Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Murni yaitu Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Kegiatan yang bersumber dari dana APBN antara lain Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan yang realisasi capaian kinerja semuanya dapat terserap dengan optimal.

Indikator program persentase pembudidaya ikan yang terpenuhi kebutuhan pakan ikan sesuai standar dengan kegiatan pengadaan calon induk dan pakan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) dan Balai Benih Ikan DI Klobak mendukung Brock Stock Center (BSC) juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya hal ini sejalan dengan fungsi BBIS yaitu memproduksi calon-calon induk unggul ikan untuk kemudian disebarakan ke Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu, selain itu BBIS mensuplai induk unggul kepada para UPR atau Unit Perikanan Rakyat untuk mendukung perkembangbiakan ikan air tawar di Provinsi Bengkulu, BBIS juga sangat mendukung kegiatan produksi benih-benih ikan yang baik untuk disuplai kepada masyarakat atau Pokdakan yang saat ini tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh BBI lokal sehingga dengan demikian sepenuhnya dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan optimal.

Kegiatan pendukung peningkatan produksi perikanan budidaya pada APBD dan APBN tahun 2024 dengan pagu dan realisasi masing-masing dapat di lihat pada Akuntabilitas Keuangan dapat kita lihat pagu dan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi perikanan budidaya terserap dengan optimal, jika kegiatan pendukungnya beragam untuk melayani kepentingan para pembudidaya dan mengintensifkan perikanan budidaya yang berkelanjutan maka target produksi perikanan budidaya dapat dicapai optimal untuk masa-masa mendatang.

Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPI) untuk target tahun 2024 yaitu 135,56 dan realisasinya sebesar 105,64 dengan capaian nya 77,92 Persen terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini di karenakan Indeks harga (it) yang di terima oleh petani khususnya subsektor perikanan peningkatan sebesar 1,92 Persen, Indeks harga yang di bayar (ib) subsektor perikanan 0,27 persen, dan di lihat dari nilai Nilai Tukar Pembudiaya ikan (NTPI) pada bulan Desember mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen hal ini terjadi karena It mengalami peningkatan sebesar 0,46 persen sementara di lihat dari Ib mengalami penurunan sebesar 0.39 persen peningkatan pada It dikarenakan meningkatnya It kelompok

budidaya air tawar sebesar 0,46 persen sedangkan menurunnya lb disebabkan oleh menurunnya indeks kelompok BPPBM sebesar 0,90 persen sedangkan indek kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT) naik sebesar 0.66 persen (sumberdata BPS Provinsi Bengkulu)

2. Produksi Perikanan Tangkap

Persentase capaian produksi perikanan tangkap di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 belum dapat dikalkulasi karena data valid yang diperoleh masih data semester I adalah sebesar 40.201.807 ton (one data, Pusdatin KKP RI 2024). Hasil produksi perikanan tangkap tahun 2024 belum bisa dianalisis terkait kurang atau melebihi target capaian karena data semester II dari Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu belum divalidasi oleh Pusdatin KKP yang mempunyai hak paten untuk mengeluarkan data-data Kelautan dan Perikanan se-Indonesia. Validasi data semester II dilakukan pada Bulan Maret tahun 2025 sehingga data-data yang diperlukan dalam pembangunan kelautan dan perikanan belum optimal dan belum menjawab sasaran yang ada. Kegiatan–kegiatan yang mendukung Program pengelolaan perikanan tangkap Tahun 2024 yang bersumber dari APBD dan APBN diantaranya adalah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil, Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, Anggaran program pengelolaan Perikanan Tangkap tahun 2024 sudah terserap dengan optimal dan sudah mencapai Target yang di tentukan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perikanan Tangkap pada APBD dan APBN tahun 2024 sesuai Tabel.6 yaitu Kegiatan yang menunjang Sasaran 3 Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator kinerja Produksi Perikanan Tangkap.

Kegiatan pendukung peningkatan produksi perikanan tangkap pada APBD dan APBN tahun 2024 dengan pagu dan realisasi masing-masing dapat di lihat pada Tabel.6. Tabel.6 dapat kita lihat pagu dan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi perikanan tangkap terserap dengan optimal, jika kegiatan pendukungnya beragam untuk melayani kepentingan para nelayan dan mengintensifkan perikanan tangkap yang berkelanjutan maka target produksi perikanan tangkap dapat dicapai optimal untuk masa-masa mendatang.

Tahun 2022 realisasi produksi perikanan tangkap adalah 87.492.89 ton lebih dari target yang ditentukan yaitu 81.029 ton hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang mendukung program pengelolaan perikanan tangkap dan sesuai arahan pemerintah pusat dalam rangka untuk pembanguan Pelabuhan Nusantara.

Tahun 2023 realisasi Produksi Perikanan Tangkap adalah 82.976,90 Ton sudah mencpai target yntag ditentukan yaitu 81,029 ton hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang mendukung program

pengelolaan perikanan tangkap adanya dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Pelabuhan Nusantara (PPN) untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap tahun berikutnya

Nilai tukar nelayan (NTN) untuk target tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditentukan, target tahun 2023 nilai tukar nelayan yaitu 109 dengan realisasi 104,12 dengan capaian target 95,25 Persen hal ini pencapaian target tidak terlalu rendah ini disebabkan pada kelompok penangkapan laut sebesar 2,26 Persen hal ini adanya indeks harga komoditas perikanan naik data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.

Untuk Nilai Tukar nelayan tahun 2024 dengan target 112 dengan realisasi sampai bulan Desember 2024 sebesar 108,89 dengan pencapaian persentase 97,22 persen hal ini dikarenakan Indeks harga yang diterima oleh petani (It) meningkat sebesar 2,76 persen sedangkan Indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib) meningkat lebih rendah sebesar 0,68 persen peningkatan pada It disebabkan oleh meningkatnya It pada kelompok penangkapan laut sebesar 2,80 persen sementara kelompok penangkapan perairan umum relatif tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. Kenaikan Ib disebabkan oleh naiknya indeks kelompok KRT dan Indeks kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) masing-masing sebesar 0,89 persen dan 0,37 persen (sumber data BPS Provinsi Bengkulu)

3. Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2024 Target Persentase Target Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 adalah sebesar 46,23%, untuk capaian ini tidak bias di akumulasi karena penghitungan berdasarkan realisasi Keuangan, dengan sub kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), dengan indikator jumlah POKMASWAS yang ditumbuh kembangkan 51 (Lima Puluh Satu) Kelompok Pokmaswas, yang telah terbentuk 48 (Empat Puluh Delapan) Kelompok Pokmaswas dengan target keuangan sudah teralisasi 100 persen, hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang mendukung persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2024 yang bersumber dari APBD dan APBN diantaranya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), tersedianya anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu perlengkapan POKMASWAS untuk beberapa kelompok antara lain Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Mukomuko dan Kabupaten Lebong serta adanya perlengkapan Khusus Petugas PSDKP Kabupaten Kepahiang dan Kota Bengkulu dan bantuan dari Provinsi Bengkulu Perahu Pokmaswas yang terletak di Kabupaten Kaur dan Mukomuko hal ini dapat terlaksananya pemantauan dan operasi armada, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang

dibina dalam membantu pengawasan PSDKP dan realisasi capaian kinerja semuanya dapat terserap dengan maksimal.

Target Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 adalah sebesar 46,23%, untuk capaian ini tidak bias di akumulasikan di karenakan penghitungan berdasarkan realisasi Keuangan, realisasi Kegiatan sudah tercapai target dan teralisasi 100 persen, hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang mendukung persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2023 yang bersumber dari APBD dan APBN diantaranya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), tersedianya perlengkapan POKMASWAS dan drone, pemantauan dan operasi armada, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP realisasi capaian kinerja semuanya dapat terserap dengan maksimal.

Pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 sudah tercapai 100 persen sama hal nya dengan tahun 2023 ini di karenakan adanya sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok Pokmaswas dan di dukung dengan adanya pengadaan peralatan Pokmaswas.

Kegiatan pendukung untuk pencapaian Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada APBD dan APBN tahun 2024 dengan pagu dan realisasi masing-masing dapat di lihat pada Tabel 7. Tabel 7 dapat kita lihat pagu dan realisasi kegiatan pendukung pencapaian Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan terserap dengan optimal, jika kegiatan pendukungnya beragam untuk melayani kepentingan para masyarakat perikanan, petani ikan, nelayan, stakeholder serta masyarakat umum secara keseluruhan dan mengintensifkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan cara selalu menjaga sumberdaya hayati dari berbagai spesies ikan di perairan laut maupun sumberdaya genetik yang ada.

4. Persentase Pengelolaan Ruang Laut

Program dan Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu indikator dalam penilaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini indikator kinerja yang akan disampaikan semuanya mempunyai peran dalam pencapaian hasil produksi, persentase indikator program Pengelolaan Ruang Laut yaitu Luas Vegetasi pantai yang di Konservasi 24,5 persen dan Persentase biota laut yang telah dilakukan upaya pelestarian yaitu 56,69 persen indikator tersebut disebabkan kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainta target tersebut kegaitan apbd dan apbn untuk tahun 2024 luas Kawasan konservasi saat ini adalah 69.331,08 Ha di bandingkan dengan tahun 2023 ada penambahan luas kawasan konservasi di tahun 2023 luas kawasan konservasi 66.133,94 Ha

Untuk persentase Biota laut yang telah dilakukan upaya pelestarian untuk target tahun 2024 yaitu 56,69 persen dengan indikastor jumlah biota laut yang dilakukan upaya pelestarian jumlah penyu yang menetas dan jumlah telur yang di dapat diakumulasikan sekitar 81,53 persen hal ini sudah mencapai

target Kegiatan – kegiatan yang mendukung program Pengelolaan Ruang Laut dapat dilihat tabel 6 terlihat bahwa kegiatan – kegiatan yang mendukung sasaran 2.1 pada APBD dan APBN antarlain Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan Kegiatan APBN antara lain Edukasi dan Sosialisasi kehati Perairan dilindungi/terancam punah, rekomendasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan,pesisir dan pulau-pulau kecil serta kegiatan rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut

5.Persentase Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program/Kegiatan yang menunjang sasaran 2 Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator kinerja jumlah pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada tahun 2024 dengan target yaitu 25 kelompok sudah mencapai target yang telah di tetapkan, kegiatan-kegiatan yang menunjang program P2HP yaitu adanya data Angka konsumsi Ikan (AKI) pada tahun 2024 Data sementara belum dapat di akumulasikan dikarenakan masih menunggu data Susenas dari BPS Pusat untuk data sementara Provinsi Bengkulu mencapai 74,23 persen dengan target 65,62 persen data di peroleh dari 10 Kabupaten/kota yang menjadi sample Tahun 2024 yaitu Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu. Dari data AKI ini Perkembangan dari tahun 2024 dan 2023 persentase perkembangan sekitar naik menjadi 3,70 persen dari target tahun 2023, dalam kegiatan Pmestina Mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan pembinaan bimbingan dan penerapan persyaratan dan standar pada usaha pengolahan ikan hal ini lakukan pembinaan Pra skp dan memonitoring UPI ber-SKP untuk tahun 2024 ini 17 upi yang telah ber-SKP. Untuk kelompok Usaha Pengolahan yang direkomendasi terbentuk badan hukum Tahun 2024 yaitu 4 Kelompok keg ini sudah mencapai target yang telah di tentukan.

Kegiatan yang mendukung perentase Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikananantara lain Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing, Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan kegiatan APNB yang mendukung persentase tersebut yaitu Pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam bentuk promosi Produk kelautan dan perikanan oleh daerah dan kampanye gemarikan,

pemolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan dalam bentuk pembinaan pra SKP dan Monitoring UPI Ber-SKP dengan realisasi target mencapai target yang di tetapkan

Tujuan 3 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD

Dicapai Melalui:

Sasaran 3.1 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD

Sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD** merupakan salah satu **indikator** dalam penilaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini. Indikator kinerja yang akan disampaikan semuanya mempunyai peran dalam pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Capaian Kinerja **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD** dengan 1 indikator.

Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD

Uraian		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi			% Capaian
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu		BB	BB	BB	BB	100
		Persentase capaian sasaran ini adalah					100

Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD yang telah ditetapkan tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 76,15 (Tujuh puluh Enam koma Lima Belas) atau dengan kategori BB / predikat Sangat Baik. Adapun indikator kinerja terukur dari:

a. Kinerja Sasaran

Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi nilai SAKIP DKP Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah BB Sangat Baik dari Target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik,dan Kriteria yang disyaratkan telah terpenuhi dengan baik dan pemanfaatan Dokumen Perencanaan sudah memenuhi standar yang baik, pengukuran kinerja secara efektif dan efesien telah dilakukan sejara berjenjang dan berkelanjutan. Rencana aksi atas kinerja sudah mencantumkan target secara periodik dan dimonitor pencapaiannya secara berkala sehingga kualitas dan implementasi perencanaan kinerja tahunan sudah maksimal. Perjanjian Kinerja eselon II dengan Gubernur pada tahun 2024 dengan indikator kinerja Nilai SAKIP DKP Provinsi Bengkulu untuk target tahun 2023 yaitu BB dengan Nilai 72,50 dan untuk tahun 2024 mendapat BB dengan capaian 76,15 ini terjadi peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 3,65 . Perbandingan nilai SAKIP Tahun 2022 yaitu BB Dengan nilai 70,70 hal ini di karenakan adanya Target pada Perjanjian Kinerja Eselon II pada Tahun 2023 hal ini dikarenakan adnya kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah pada Tahun 2023 yaitu Pembangunan Pelabuhan Nusantara (PPN)

Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Nomor: 700/LHE-AKIP/INP/2024, Tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, nilai SAKIP dengan kategori BB hal ini disebabkan karena Dokumen rencana strategis, dokumen perjanjian kinerja, perencanaan kinerja tahunan, indikator kinerja utama, laporan kinerja sudah dipublikasikan/ diupload di website resmi OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

b. Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 capaian kinerja sasaran 1 meningkatnya tata kelola kinerja OPD didukung oleh program dan kegiatan yang alokasi dananya bersumber dari APBN dan APBD, hal ini dapat diuraikan pada lampiran 1.

b. Perjanjian Kinerja Khusus Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KHUSUS TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

No	Uraian	Target 2023	REALISASI
1	Kategori Nilai PMRB OPD	BB	100
2	Kategori Nilai Evaluasi AKIP OPD	BB	100 %
3	Persentase tindak lanjut LHP OPD	75 %	43,94 %
4	Persentase Pemenuhan LPPD OPD	100 %	100 %
5	Kategori Inovasi OPD	Inovatif	Tercapai
6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD	Cukup Informatif	Tercapai
7	Persentase Pencapaian MCP Renaksi KPK	80 %	
8	Persentase Capaian Realisasi Anggaran (TEPRA)	95 %	48,44 %

Pada Tahun 2023 Perjanjian Kinerja Khusus terdapat beberapa indilator dan target yang belum tercapai dan dikarenakan capian target pada Triwulan III, unutk triwulan IV belum ada. Untuk Persentase Tindak lanjut LHP belum mencapai target hal ini di karenakan hasil LHP masih di tindak lajuti oleh dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Untuk Persentase Capian Realisasi Anggran (TEPRA) untuk capian data capaian masih data Triwulan III, sedangkan Pencairan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan Ke IV pada Bulan Oktober 2023.

c. Perjanjian Kinerja Kegiatan Unggulan Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	FAKTOR PENDORONG /PENGHAMBAT
1	Membangun Pelabuhan Perikanan, Pemberian izin usaha perikanan serta pemberian alat tangkap gratis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang tersedia	1 Pelabuhan	1Lokasi	Ada nya dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Pelabuhan

Pada tahun 2024 perjanjian Kinerja Prioritas Daerah yaitu membangun pelabuhan perikanan, dan pemberian izin usaha perikanan serta pemberian alat tangkap gratis. Untuk tahun 2024 terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Nusantara (PPN) yang berlokasi di Kabupaten Seluma yang di biyai Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu pembangunan Break Water, Pembangunan Dermaga, Pembangunan Jalan dan Drainase dengan Pagu Anggaran Rp. 8.300.000.000,- dan terealisasi Rp. 8.275.984.208,- Pembangunan Pelabuhan Nusantara (PPN) ini akan di lanjutkan pada Tahun 2025 untuk Pembangunan Pelabuhan ini sudah terlaksana 100 Persen sedangkan untuk tahun 2025 akan di laksanakan Pembangaun Pelabuhan Nusantara di Kabupaten Kaur penyusunan Dokumen Perencanaan dan Hibah tanah dilaksanakan pada Tahun 2024.

Untuk indikator Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil dengan Pagu Anggaran RP. 1.320.000.000,- dengan realisasi Anggaran Rp. 1.313.533.900,- dengan capaian 99,51 Persen dalam hal ini telah terlaksana dan tidak ada kendala dan hambatan untuk kegiatan Prioritas Daerah sudah teralisasi dengan baik

d. Perjanjian Kinerja Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas OPD Tahun 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Community Based Marine Management	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuh kembangkan	5 kelompok	100 %
		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	2 Ha	0,7 Ha

Untuk perjanjian Kinerja Kegiatan Proritas OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dengan indikator luas Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang direhabilitasi tidak mencapai target dari target yang telah di tetapkan dari target 2 Ha dan tercapai hanya 0,7 Ha hal ini di karenakan lokasi yang di rehabilitasi sesuai dengan lokus Kegiatan yang hanya ada di daratan Pulau Tikus.

B. Akuntabilitas Keuangan

Sumber keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu berasal dari dana pembangunan dan rutin. Dana pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rincian pembiayaan pelaksanaan pembangunan dari APBN dan APBD berupa belanja langsung dan tidak langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Rincian Pembiayaan dan Realisasi Program/ Kegiatan APBN, APBD TA 2024

Rincian Pembiayaan dan Realisasi Program/ Kegiatan APBN, APBD TA 2024						
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)	SUMBER DANA	KET
1	2	3	4		5	6
APBN						
PROGRAM DUKUNGAN MANANJEMEN /TP		199.724.000	188.796.464	95		
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Penyusunan Perencanaan satker Dekonstrasi	199.724.000	188.796.464	95	APBN	
PROGRAM PENGELOLA PERIKANAN TANGKAP/TP		295.768.000	294.522.000	100		
1	Pengelolaan perikanan dan Kelautan	114.676.000	113.498.000	99	APBN	
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan	181.092.000	181.024.000	100	APBN	
PROGRAM PENGELOLA PERIKANAN BUDIDAYA/TP		311.937.000	310.387.725	100		
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	146.498.000	146.200.025	100	APBN	
2	Dukungan Manajemen internal Lingkup itjen Perikanan Buduaya	165.439.000	164.187.700	99	APBN	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN/TP		171.652.000	168.116.068	98		
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pemantauan, Operasi Armada	86.600.000	86.600.000	100	APBN	
2	Dukungan Manajemen	85.052.000	81.516.068	96	APBN	
PROGRAM PENGUAT DAYA SAING USAHA DAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN/TP		249.251.000	241.902.931	97		
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	78.896.000	78.896.000	100	APBN	
2	Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal (Base Line)	170.355.000	163.006.931	96	APBN	
PROGRAM PENGELOLA RUANG LAUT/TP		485.600.000	458.989.784	95		
1	Program Kualitas Lingkungan Hidup	330.000.000	317.217.424	96	APBN	
2	Layanan manajemen Kinerja Internal (Base Line)	155.600.000	141.772.360	91	APBN	
TOTAL		1.713.932.000	1.662.714.972	97		

Rincian Pembiayaan dan Realisasi Program/ Kegiatan APBD 2024						
NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA	KET
1	2	3	4		5	6
APBD						
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	#####	15.206.114.800	97,86	APBD	
I	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.000.000	277.412.628	99,08	APBD	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.000.000	204.676.918	99,84	APBD	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	72.735.710	96,98	APBD	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	#####	11.458.857.328	98,18	APBD	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.566.803.752	11.392.777.328	98,50	APBD	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.000.000	66.080.000	62,93	APBD	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	16.852.000	84,26	APBD	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	16.852.000	84,26	APBD	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.000.000	533.869.612	98,86	APBD	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	24.675.000	98,70	APBD	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.993.000	99,93	APBD	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.000	118.615.188	98,85	APBD	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.000.000	107.249.186	97,50	APBD	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000	273.337.238	99,40	APBD	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.500.000	150.379.600	93,69	APBD	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.500.000	150.379.600	93,69	APBD	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.707.000.000	1.678.582.542	98,34	APBD	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	243.602.542	97,44	APBD	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.457.000.000	1.434.980.000	98,49	APBD	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.160.000.000	1.090.161.090	93,98	APBD	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.000.000	312.762.250	82,31	APBD	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	750.000.000	749.125.040	99,88	APBD	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	28.273.800	94,25	APBD	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN. PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	169.500.000	150.726.000	88,92	APBD	
I	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	129.500.000	112.554.000	86,91	APBD	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	10.000.000	10.000.000	100,00	APBD	
1						
2	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	99.500.000	82.554.000	82,97	APBD	
3	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	20.000.000	20.000.000	100	APBD	
II	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	20.000.000	20.000.000	100	APBD	
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	20.000.000	20.000.000	100	APBD	
III	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20.000.000	18.172.000	90,86	APBD	
1	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20.000.000	18.172.000	90,86	APBD	

C	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.670.000.000	9.638.308.108	99,67	APBD	
I	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Degan 12 Mil	1.320.000.000	1.313.533.900	99,51	APBD	
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.320.000.000	1.313.533.900	99,51	APBD	
II	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	30.000.000	29.440.000	98,13	APBD	
1	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	30.000.000	29.440.000	98,13	APBD	
III	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	20.000.000	19.350.000	96,75	APBD	
1	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	20.000.000	19.350.000	96,75	APBD	
IV	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	8.300.000.000	8.275.984.208	99,71	APBD	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	8.300.000.000	8.275.984.208	99,71	APBD	
D	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.404.608.000	3.354.451.589	98,53	APBD	
I	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	45.000.000	42.766.200	95,04	APBD	
1	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.110.200	95,55	APBD	
2	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25.000.000	23.656.000	94,62	APBD	
II	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.359.608.000	3.311.685.389	98,57	APBD	
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.084.608.000	2.054.300.620	98,55	APBD	
2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.275.000.000	1.257.384.769	98,62	APBD	
E	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.015.000.000	1.007.798.074	99,29	APBD	
I	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	965.000.000	960.812.274	99,57	APBD	
1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Rp 25.000.000	Rp 24.670.694	98,68	APBD	
2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Rp 20.000.000	Rp 19.348.560	96,74	APBD	
3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Rp 20.000.000	Rp 19.780.000	98,90	APBD	
4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Rp 900.000.000	Rp 897.013.020	99,67	APBD	
II	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 50.000.000	Rp 46.985.800	93,97	APBD	
1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Rp 25.000.000	Rp 24.625.800	98,50	APBD	
2	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 25.000.000	Rp 22.360.000	89,44	APBD	

F	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	340.000.000	328.405.169	96,59	APBD	
I	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	43.800.000	87,60	APBD	
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25.000.000	25.000.000	100,00	APBD	
2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25.000.000	18.800.000	75,20	APBD	
II	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	40.000.000	38.990.300	97,48	APBD	
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20.000.000	18.990.300	94,95	APBD	
2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	20.000.000	20.000.000	100,00	APBD	
III	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	245.614.869	98,25	APBD	
1	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	245.614.869	98,25	APBD	
TOTAL		30.138.411.752	29.685.803.740	98,50		

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dan pelaksanaan kebijakan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran, tidak terlepas dari anggaran yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Rincian biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 baik bersumber dana APBN **Rp. 1.713.932.000,-** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang sudah terealisasi **Rp. 1.662.714.972,-** (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) dengan persentase 97,01 % dan APBD-P adalah sejumlah **Rp. 30.138.411.752,-** (*Tiga Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) yang sudah terealisasi **Rp. 29.685.803.740,-** (*Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau 98,50 %, terdapatnya sisa dana kegiatan sebesar **Rp. 630.940.012,-** (*Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Belas Rupiah*) diantaranya : kegiatan di Program Penolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi dan program Pengelolaan Perikanan Budidaya disebabkan Keterbatasan Waktu Pelaksanaan, serta sisa belanja langsung yang tidak habis pakai karena alasan konvensional Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai Laporan Kinerja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa dari 3 Tujuan dan 3 sasaran strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 bahwa pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan tercapai pada bidang Pengawasan dan bidang Pengelolaan Ruang Laut yaitu 95,37%, atau linier nilai rata-rata indikator Kinerja Utama sebesar 95,37%. Berdasarkan one data Pusdatin KKP tahun 2024, bidang perikanan budidaya dan bidang perikanan tangkap data yang valid masih data semester I, data semester II masih menunggu validasi datanya Bulan Maret Tahun 2025

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja ini, bahwa 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Review RENSTRA sampai dengan tahun 2021 semuanya telah didukung oleh kegiatan tahun 2024 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tetapi belum menunjukkan kontribusi yang optimal dalam **"Meningkatkan Kontribusi Sub sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah"** dikarenakan kegiatan masih banyak yang belum menyentuh kepentingan publik, kegiatan-kegiatan yang mendukung Tiga (3).

Secara ringkas seluruh capaian kinerja cukup baik, yang berhasil, cukup berhasil maupun yang belum berhasil telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Hal ini juga akan menjadi masukan dalam menetapkan strategi pemecahan masalah dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan **Rencana Kerja Tahun 2024** serta penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Pimpinan beserta segenap jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu mengharapkan agar Laporan Kinerja tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada Gubernur sebagai pemberi mandat dan masyarakat sebagai stakeholder serta sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Dalam penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terdapat kendala terutama dalam pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor kendala ini adalah:

- Terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia yang ada.
- Adanya perubahan sasaran pada saat revaluasi Renstra tahun 2019 s/d 2021 yang menyebabkan beberapa data target dan realisasi kinerja tidak terisi.
- Keterbatasan waktu Pelaksanaan dikarenakan dana merupakan dana APBD-P

B. Saran

Berdasarkan analisa yang telah dilaksanakan untuk kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 dan capaian selama 1 (Satu) tahun, serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dalam pengembangan kelautan dan perikanan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya adalah:

1. Perlu adanya penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, serta penetapan target kinerja yang relevan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang saling berkesinambungan.
2. Perlu adanya kawasan terintegrasi, dimana seluruh komponen pendukung seperti lokasi, komoditi, hulu-hilir dan Badan Usaha Milik Petani Ikan/ Nelayan, sarana prasarana perikanan tangkap (kapal \geq 30 GT serta alat tangkap yang canggih disesuaikan dengan jenis ikan hasil tangkapan yang ada di wilayah Bengkulu) sehingga dapat bersinergi untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai sentral Kelautan dan Perikanan.
3. Memberdayakan petani ikan/ nelayan agar menjadikan perikanan bukan menjadi pekerjaan sampingan, tetapi merupakan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan petani ikan/ nelayan.
4. **Mengoptimalkan pelatihan diversifikasi olahan produk hasil perikanan untuk memberikan nilai tambah dan daya saing serta inovasi pada bahan baku dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta sisa hasil samping dari bahan baku hasil perairan lainnya sehingga dapat menjadikan hilirisasi yang berkelanjutan.**
5. **Mengoptimalkan jumlah pengolahan dan pemasaran hasil perikanan seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dan harus dimasukkan dalam kegiatan APBD supaya linier dengan kegiatan di APBN pada Dirjen Penguatan Daya Saing Perikanan dan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.**
6. **Mengoptimalkan fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan atau Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dengan cara dilakukan akreditasi terlebih dahulu oleh pemangku kebijakan supaya UPT ini dapat berhasil guna, outcome tercapai, pengujian olahan hasil perairan/ diversifikasi produk hasil perairan dapat dilakukan serta dapat memberikan/ meningkatkan PAD UPT DKP.**
7. Mengoptimalkan penanaman kembali atau rehabilitasi tanaman pantai/ mangrove untuk mencegah abrasi pantai dan menjaga kelestarian ekosistem laut.
8. Perlu adanya penambahan CPNS/ PNS Pengawas Perikanan, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mengoptimalkan dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran di ranah Kelautan dan Perikanan.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal untuk menekan biaya produksi.
10. **Mengoptimalkan inovasi hasil olahan perikanan daerah sebagai kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan.**

11. **Perlu adanya peningkatan kompetensi/ kualitas sumberdaya manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Honor yang siap kerja membantu kelancaran dan peningkatan kinerja yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.**
12. Perlu penekanan pada setiap pejabat struktural untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

LAMPIRAN

Tabel. Tata Kelola Kinerja OPD

Tabel 6 Kegiatan yang Menunjang Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD, Indikator Kinerja Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu						
No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sumber Dana	Keterangan
APBN						
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Penyusunan Perencanaan satker Dekonstrasi	199.724.000	188.796.464	94,53	APBN	
		199.724.000	188.796.464	94,53		
APBD						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.000.000	204.676.918	100	APBD	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	75.000.000	72.735.710	96,98	APBD	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.566.808.752	11.392.777.328	98,50	APBD	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.000.000	66.080.000	62,93	APBD	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	16.852.000	84,26	APBD	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	24.675.000	98,70	APBD	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.993.000	99,93	APBD	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.000	118.615.188	98,85	APBD	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.000.000	107.249.186	97,50	APBD	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000	273.337.238	99,40	APBD	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.500.000	150.379.600	93,69	APBD	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	243.602.342	97,44	APBD	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.457.000.000	1.434.980.000	98,49	APBD	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.000.000	312.762.250	82,31	APBD	
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	750.000.000	749.125.040	99,88	APBD	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	28.273.800	94,25	APBD	
	Jumlah	15.539.308.752	15.206.114.600	97,86		

Tabel. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

PENGUKURAN KINERJA						
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH(OPD)						
OPD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU					
TAHUN ANGGARAN 2024						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI KINERJA 2024	% CAPAIAN KINERJA
1	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	3,40	Persen	5,39	158,52% Data ini data triwulan III thn 2023 dari BPS
2	Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan (NTN) dan Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Nelayan	112		108,89	97%
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	135,56		105,64	78%
	Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	90.117.670	Ton	40.201.807	44,61 % Data ini hanya data sementara pada semester I, untuk data Semester II menunggu Validasi Nasional dari
		Produksi Periknana Budidaya	232.957	Ton	144.482.085	62,02 % Data ini hanya data sementara pada semester II menunggu Validasi Nasional dari Pusdatin RI
3	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	BB		BB	76,15
	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	BB		BB	76,15
	Jumlah Anggaran Seluruh Program (APBD) :	Rp 30.138.411.752				
	Jumlah Anggaran Seluruh Program (APBN) :	Rp 1.713.932.000				
	Realisasi Anggaran Seluruh Program (APBD) :	Rp 29.685.803.740				
	Realisasi Anggaran Seluruh Program (APBN) :	Rp 1.662.714.972				

Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2023

CAPAIAN KINERJA							
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI KINERJA (TAHUN)		% CAPAIAN KINERJA
					2023	2024	
1	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	3,40	Persen	7,31	5,39	158,52% Data ini data triwulan III thn 2023 dari BPS
2	Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan (NTN) dan Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Nelayan	112		104,12	108,89	97%
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	135,56		101,5	105,64	78%
	Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	90.117.670	Ton	38.951.830	40.201.807	44,61 % Data ini hanya data sementara pada semester I, untuk data Semester II menunggu Validasi Nasional dari Pusdatin RI
		Produksi Periknana Budidaya	232.957	Ton	82.347,00	144.482.085	62,02 % Data ini hanya data sementara pada semester II menunggu Validasi Nasional dari Pusdatin RI
3	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	BB		BB	BB	76,15
	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kineria OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	BB		BB	BB	76,15

